



RENJA

(Rencana Kerja)

2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Jln. siliwangi No 65 Telp/Fax (0266) 227440
email: dp3akabsi@gmail.com -Sukabumi 43113

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya lah maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun anggaran 2024 telah terlaksana.

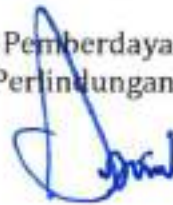
Adapun Penyusunan Rencana Kerja ini didasari ketentuan Pasal 83 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 ini memuat uraian rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sukabumi.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Jawa Barat.

Sukabumi, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,



Drs. H. EKI RADIANA RIZKI, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	27
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	31
2.4 Kajian (<i>Review</i>) terhadap Rancangan Awal RKPD 2024.....	33
BAB III.....	39
TUJUAN SASARAN.....	39
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	42
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV.....	44
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	44
4.1 Rencana Kerja.....	44
4.2 Rencana Pendanaan.....	50
PENUTUP.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mana akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sukabumi Hal yang menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi 2021 – 2026 adalah isu meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya Desa/Kelurahan/Kecamatan Layak anak yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak dalam rangka Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi 2021 - 2026.

Sebagaimana Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir dan Bathin", Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi menuju masyarakat sejahtera lahir batin secara berkelanjutan yang memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang

layak, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
- b. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
- c. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel

Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan dari misi ke-1 yaitu "Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing". Misi ini diarahkan salah satunya untuk meningkatkan Kesetaraan gender, dengan sasarannya yaitu Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak. Adapun sasaran Renstra Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga dengan strategi yang dilakukan meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, hal ini yang akan tertuang dalam berbagai program kegiatan prioritas rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahunan yang

akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : UUD 1945

Landasan Operasional

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 16) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
- 33) Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 82);
- 34) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 3);

- 35) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 32);
- 36) Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 050/Kep.158-DP3A/2022 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Tujuan Internal:

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi DP3A Kabupaten Sukabumi dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan;
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di DP3A Kabupaten Sukabumi dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di DP3A Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tujuan External:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu satu tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah.

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun satu tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sukabumi ini disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1 Kajian Hasil Evaluasi Renja PD tahun sebelumnya (2022)

Pencapaian Kinerja berdasarkan evaluasi dalam pencapaian indikator kinerja sesuai dengan perjanjian Kinerja tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.1 dimana terdapat:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja PD tahun 2022		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)		(4)	(5)	
1	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100
	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100
	Meningkatnya disiplin aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100
	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Cakupan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100
	Meningkatnya kualitas dan Kompetensi aparatur	Cakupan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	42,22%	100
2	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Indeks Development Gender (IDG)	57,45	4,53	57,07	57,07	100
		Kabupaten Layak anak (KLA)	1000	0,66	781,34	900,15	100

2.1.2 Capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi dijabarkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang rinciannya disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DP3A Kabupaten Sukabumi pada Renstra 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target RENSTRA PD						REALISASI		Proyeksi		Catatan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	Nilai	80	85	90	90	95	95	75	75	90	95	
2	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	%	97,99	98,02	98,06	98,09	98,12	98,15	97,99	98,02	98,06	98,09	
3	Tingkat akurasi data gender dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Rasio	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,016	0,012	0,0187	0,0187	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	5,814	4,46	0,0032	0,0032	
	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	12	26	26	36	100	100	12	26	26	36	

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi s/d Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% capaian realisasi Tahun Selarang	Realisasi s/d Tahun 2023	Target akhir periode RPJMD/ Rentra
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran		Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga						
1	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE)	80	75	85	75	88,24	-	95
2	Persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	97,99	97,99	98,02	98,02	100	-	98,15
3	Tingkat akurasi data gender dan anak	100	100	100	100	100	-	100

4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,0187	0,016	0,0187	0,012	64,03	-	0,0187
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0032	5,814	0,0032	4,46	139362,50	-	0,0032
6	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	12	12	26	26	100	-	100

Tabel 2.3. Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan target, realisasi tahun lalu, realisasi sampai dengan tahun lalu, target RPJMD/rencana strategi

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan

- a. Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
- b. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapat alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.759.859.047 dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.730.540.455 dengan persentase di 99,49%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 57.499.600 terealisasi sebesar Rp. 56.845.100 atau 99,86% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.767.000 terealisasi sebesar Rp. 14.505.500 atau 98,23% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen.
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.806.250 terealisasi sebesar Rp. 2.801.250 atau 99,82%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Dokumen RKA 1 Dokumen.
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.766.200 terealisasi

sebesar Rp. 4.581.200 atau 96,12%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Perubahan RKA 1 Dokumen.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.766.200 terealisasi sebesar Rp. 4.761.200 atau 99,90%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen DPA 1 Dokumen.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.766.200 terealisasi sebesar Rp. 4.761.200 atau 99,90%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Perubahan DPA 1 Dokumen.

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.448.000 terealisasi sebesar Rp. 11.428.000 atau 99,83% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Bulanan SKPD 12 Dokumen.

7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.179.750 terealisasi sebesar Rp. 14.006.750 atau 98,78% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.499.084.447 terealisasi sebesar Rp. 4.496.709.210 atau 99,95% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.492.272.847 terealisasi sebesar Rp. 4.489.922.610 atau 99,95% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun.

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.127.100

terrealisasi sebesar Rp. 1.122.100 atau 99,56%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dokumen.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.734.500 terealisasi sebesar Rp. 3.724.500 atau 99,73%. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Keuangan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 18 Dokumen

4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp. 1.950.000 terealisasi sebesar Rp. 1.940.000 atau 99,49% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.564.000 terealisasi sebesar Rp. 3.564.000 atau 100,00% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.564.000 terealisasi sebesar Rp. 3.564.000 atau 100,00% Keluaran dari subkegiatan ini adalah :

- Dokumen Laporan Penatausahaan BMD 12 Dokumen.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.086.000 terealisasi sebesar Rp. 2.086.000 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.086.000 terealisasi sebesar Rp. 2.086.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Fasilitasi serta Koordinasi Administrasi Kepegawaian ASN selama 12 Bulan

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 235.906.400 terealisasi sebesar Rp. 233.952.250 atau 99,17% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.011.400 terealisasi sebesar Rp. 5.011.400 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 85.289.650 terealisasi sebesar Rp. 83.453.000 atau 97,85% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 bulan
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 1.975.250 terealisasi sebesar Rp. 1.975.250 atau 100,00% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.248.850 terealisasi sebesar Rp. 5.248.850 atau 100,00% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 42.417.500 terealisasi sebesar Rp. 42.303.500 atau 99,73% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bulan.
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 5.310.500 terealisasi sebesar Rp. 5.310.500 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan.
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 90.653.250 terealisasi sebesar Rp. 90.649.750 atau 100,00% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 60.805.600 terealisasi sebesar Rp. 60.600.000 atau 99,66% yang terdiri dari :
 1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 60.805.600 terealisasi sebesar Rp. 60.600.000 atau 99,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Kursi Tamu 2 Unit
 - Kursi Biasa 20 Unit
 - Lemari Besi 2 Unit
 - Meja Kerja 8 Unit
 - Komputer PC 2 Unit
 - Printer 2 Unit
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 644.963.000 terealisasi sebesar Rp. 620.874.495 atau 96,27% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 70.500.000 terealisasi sebesar Rp. 59.687.797 atau 84,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 574.463.000 terealisasi sebesar Rp. 561.186.698 atau 97,69% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran 12 Bulan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 255.950.000 terealisasi sebesar Rp. 255.909.400 atau 99,98% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 255.950.000 terealisasi sebesar Rp. 255.909.400 atau 99,98% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12 bulan

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 256.272.750 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 254.832.250 dan menghasilkan persentase di 99,44%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 78.641.500 terealisasi sebesar Rp. 78.301.000 atau 99,57 % yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan anggaran sebesar Rp. 54.654.000 terealisasi sebesar Rp. 54.314.000 atau 99,38% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Peserta Apresiasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 30 Orang
 - Peserta Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 100 Orang
 - Peserta Rapat Koordinasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Kabupaten 70 Orang
 - Data dan Bahan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 12 Bulan

- Laporan Verifikasi Lapangan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 1 Paket
- 2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 13.165.000 terealisasi sebesar Rp. 13.164.500 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Advokasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Kebonpedes 22 Orang
- 3. Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan anggaran sebesar Rp. 10.822.500 terealisasi sebesar Rp. 10.822.500 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Rakor POKJA PUG) 85 Orang
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 177.631.250 terealisasi sebesar Rp. 176.531.250 atau 99,38% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 177.631.250 terealisasi sebesar Rp. 176.531.250 atau 99,38% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Peserta Pelantikan Pengurus Periode 2021-2026 dan Seminar Ketahanan Keluarga - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 100 Orang
 - Jumlah Peserta Pelantikan Pengurus Periode 2021-2026 dan Seminar Ketahanan Keluarga - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 100 Orang
 - Peserta Peringatan Hari Ibu 2022 - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 100 Orang
 - Peserta Peringatan Hari Kartini 2022 - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 100 Orang

- Peserta Peringatan Hari Kartini 2022 - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 200 Orang
- Peserta Rapat Kepengurusan - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 90 Orang
- Peserta Rapat Pengurus Inti - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 22 Orang
- Peserta Rapat Pengurus Pleno - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 44 Orang
- Peserta Sosialisasi PHBS dalam menunjang Kesehatan dan Ketahanan Keluarga - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) 50 Orang
- Peserta Sosialisasi Produk Hukum Urusan PPPA - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 60 Orang
- Peserta Workshop Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perempuan Kader Partai - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 47 Orang
- Peserta Workshop Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perempuan Kader Partai - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 50 Orang

3. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 174.899.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 174.123.500 dan menghasilkan persentase di 99,56%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 62.025.000 terealisasi sebesar Rp. 61.950.000 atau 99,88% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan

anggaran sebesar Rp. 62.025.000 terealisasi sebesar Rp. 61.950.000 atau 99,88% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Dak Non Fisik BOPPA Pencegahan KTPA/TPPO Perempuan 5 Kegiatan
- Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 91.275.000 terealisasi sebesar Rp. 91.275.000 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 91.275.000 terealisasi sebesar Rp. 91.275.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - DAK Non Fisik BOPPA Pelayanan KTPA/TPPO Perempuan 10 Orang
 - Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Layanan

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.599.000 terealisasi sebesar Rp. 20.898.500 atau 96,76% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.599.000 terealisasi sebesar Rp. 20.898.500 atau 96,76% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - DAK Non Fisik BOPPA Manajemen Perempuan 1 Kegiatan

- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (DAU) 10 Orang
- Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (DAK) 10 Orang
- Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan / TPPO 1 Kegiatan

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 2.278.731.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.266.557.500 dan menghasilkan persentase di 99,47%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.276.554.100 terealisasi sebesar Rp. 1.276.292.600 atau 99,98% yang terdiri dari:
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 76.554.100 terealisasi sebesar Rp. 76.292.600 atau 99,66% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah KK Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 100 KK
 2. Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.200.000.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Hibah DWP 1 Paket
 - Hibah PKK 1 Paket

- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000 terealisasi sebesar Rp. 22.500.000 atau 100% yang terdiri dari :
- Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000 terealisasi sebesar Rp. 22.500.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pelatihan Kelompok PEKKA
 - Pembentukan Kelompok PEKKA
- c. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggarannya sebesar Rp. 979.676.900 terealisasi sebesar Rp. 967.764.900 atau 98,78% yang terdiri dari :
1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 979.676.900 terealisasi sebesar Rp. 967.764.900 atau 98,78% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Bimtek TOT Fasilitator 100 Orang
 - FGD 3 Kegiatan
 - Jingle Perahu Kertas 1 Kegiatan
 - Pelatihan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan & Sosial 10 Kecamatan
 - Pembelajaran, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan & Sosial 10 Kegiatan
 - Pembentukan Kelompok Perahu Kertas 10 Kegiatan
 - Sosialisasi (Launching) 100 Orang
 - Wisuda 1 Kegiatan

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 44.754.500 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 44.754.500 dan menghasilkan persentase di 100 %. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 44.754.500 terealisasi sebesar Rp. 44.754.500 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 44.754.500 terealisasi sebesar Rp. 44.754.500 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :

- Analisis Profil Gender dan Anak Tahun 2021 1 Paket
- Jumlah Peserta Pengumpulan Bahan Profil Gender dan Anak Tahun 2021 32 Orang
- Jumlah Peserta Rekonsiliasi Data Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi (KED) terhadap Perempuan dan Anak 65 Orang

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 80.007.250 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 80.007.250 dan menghasilkan persentase di 100%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 46.435.500 terealisasi sebesar Rp. 46.435.500 atau 100% yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 46.435.500 terealisasi sebesar Rp. 46.435.500 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Pertemuan FAD Tingkat Kabupaten 1 Kegiatan
 - Pembentukan Kampung Ramah Anak 30 Orang
 - Sosialisasi Kabupaten Layak Anak 30 Orang
- b. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 46.435.500 terealisasi sebesar Rp. 46.435.500 atau 100% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 16.714.000 terealisasi sebesar Rp. 16.714.000 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Talkshow 60 Orang
 2. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 16.857.750 terealisasi sebesar Rp. 16.857.750 atau 100% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Rakor Gugus Tugas KLA 50 Orang
 - Rakor Gugus Tugas Per Klaster 50 Orang

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak mendapat alokasi anggaran setelah refocusing dan perubahan sebesar Rp. 647.878.500 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 615.335.400 dan menghasilkan persentase di 94,98%. Adapun Kegiatan dan Sub kegiatan yang

dilaksanakan beserta anggaran, realisasi dan keluarannya adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 100.305.000 terealisasi sebesar Rp. 98.961.000 atau 98,66% yang terdiri dari :
 1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.060.000 terealisasi sebesar Rp. 1.730.000 atau 83,98% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 100 %
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 98.245.000 terealisasi sebesar Rp. 97.231.000 atau 98,97% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 470.767.500 terealisasi sebesar Rp. 445.568.400 atau 94,65% yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 terealisasi sebesar Rp. 290.423.400 atau 96,81% Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Early Warning System 6 Kegiatan
 - Kunjungan Kerja 1 Kegiatan
 - P2TP2A Goes to Campus 1 Kegiatan
 - Penanganan Kasus Anak 100 Orang

- Penanganan Kasus Perempuan 30 Orang
 - Sosialisasi Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Untuk Satgas Kecamatan 50 Orang
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 170.767.500 terealisasi sebesar Rp. 155.145.000 atau 90,85 %
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah :
 - Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Layanan
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 76.806.000 terealisasi sebesar Rp. 70.806.000 atau 92,19% yang terdiri dari:
1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 76.806.000 terealisasi sebesar Rp. 70.806.000 atau 92,19%
Keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - DAK NON FISIK BOPPA Manajemen Perempuan dan Anak 3 Kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan PD

Hasil evaluasi target pelayanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi didasarkan atas hasil pelaksanaan program/kegiatan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis dari pencapaian target kinerja atas sasaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dihadapi oleh DP3A Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan :
 - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan internal dan informasi public
 - 2) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
 - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
 - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Belum optimalnya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
 - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-

- kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana.
 - 6) Belum optimalnya program penciptaan kemandirian ekonomi untuk perempuan dan Kesetaraan gender.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak :
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
 - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak :
- 1) Masih belum seluruh anak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
 - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
 - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
 - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita.
 - 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
 - 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
 - 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.
 - 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

2.2.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan dan Keadilan gender di daerah.
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF, USAID MADANI, IOM.
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030).
4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
6. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group

Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan DP3A Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan bagi perempuan.
- c. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
- d. Masih terjadinya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
- e. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak.
- f. Belum dimilikinya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar.
- g. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
- h. Tingginya Unmetneed KB.
- i. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Perangkat Daerah.

Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

2.4 Kajian (*Review*) terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

2.4.1 Proses Pengkajian

Proses pengkajian Rencana awal RKPD 2024 dilakukan secara bertahap dimulai pada Triwulan pertama tahun 2022 sampai dengan Triwulan pertama tahun 2023, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa penambahan perubahan yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang dilakukan oleh intern Perangkat Dinas dalam rangka optimalisasi kinerja dan efisiensi Anggaran, proses yang dilakukan meliputi:

1. Pengajuan Usulan Kegiatan;

Kegiatan diajukan oleh masing-masing bidang dan sekretariat, Kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2024 diproyeksikan untuk mendukung pencapaian kinerja Indikator Utama pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD dan RENSTRA tahun 2021 – 2026.

2. Analisis kebutuhan berdasarkan target kinerja kegiatan yang diusulkan dan perkiraan target yang akan dicapai;

Proses ini dilakukan agar Output dan Outcome yang diajukan bisa menunjang pencapaian target kinerja

3. Penyesuaian *Output* dan *Outcome* kegiatan untuk menunjang pencapaian target kinerja sesuai dengan RPJMD dan RENSTRA yang telah ditetapkan.

Proses ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil daripada analisa Kebutuhan

2.4.2 Capaian Kinerja yang sudah ditetapkan

Pengukuran kinerja kegiatan dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan Pelaksanaan Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi di Tahun Anggaran 2024 dan nilai capaian kegiatannya disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kegiatan dan Target Kinerja DP3A tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
1	3	4
1	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
		Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD
		Dokumen Perubahan Rencana Aksi Kinerja
		Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan
		Dokumen Rencana Aksi Kinerja
		Dokumen Rencana Kerja
		Dokumen Rencana Kerja Perubahan
		Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
		Dokumen Rencana Strategis
	2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD
	2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan - SKPD
	2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA - SKPD
	2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan - SKPD
	2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
		Dokumen Penginputan SIPD
		Dokumen Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Bulanan
		Dokumen Penyusunan Manajemen Resiko
		Dokumen Rekonsiliasi Data Perencanaan
	2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen SPIP
		Jumlah Laporan Evaluasi E - Sakip
		Laporan Evaluasi Kinerja
		Laporan Tahunan Dinas
		LPPD
	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Dan Tunjangan ASN
	2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan SKPD
		Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
		Dokumen Laporan Keuangan Triwulan SKPD
		Rekonsiliasi Pelaporan Keuangan Intern
	2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
	2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	2.08.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan RKBMD

2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.08.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepagawaian
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Penerangan
2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hekter kecil no.10
	Stabilo
	Lakban Coklat Uk. Besar
	LAKBAN BENING BESAR
	Map biola Ukuran Folio
	Double Tape
	isi hektter kecil no.10
	Map Plastik Folio
	Lakban Hitam Uk. Besar
	Buku Folio
	Spidol Whiteboard Hitam
	Stop Map Folio (Biasa) Uk. Standar, Bahan Karton
	Buku agenda
	Balpoint Biasa
	Odner
	binder Klip 155
	Stop Map Snelhektter Uk. Folio, Bahan Plastik
	sticky notes
	Spidol Permanet Hitam
	Balpoint Boliner
	Label Stiek Note Joyko
	Amplop Putih Uk. 10,5 x 22,5 cm Jaya
	Fotokopi Hitam Putih Kertas HVS A4/ F4 Uk. 70 Gram
	Baterai Alkaline, ukuran AAA isi 2 buah/set
	Baterai 9volt persegi
	Flash Disk 64 Gb
	Kertas F4 70 Gram
	Kertas F4 80 gram
	Kertas A4 80 Gram
	Kertas Warna F4 70gram
	Kertas Warna A4 70gram
	Kertas A4 70gsm
	Maternal @Rp. 10.000
	Cartridge HP Laserjet Compatible Compatible Printer HP
	Tinta Printer Epson Black/Color Original
2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan
	Alat Kesehatan
	Alat Perabot Kantor
2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak
2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dan Belanja Jasa Kantor
2.08.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah
	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya Jaringan Komunikasi Data
		Biaya tagihan air
		Biaya tagihan internet
		Biaya tagihan listrik
		Biaya tagihan telepon
	2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Dai Majelis Talim pengajian Aparatur
		Honorarium Pegawai Non ASN, beserta jaminan kecelakaan, kematian dan kesehatan pegawai non ASN
	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Mobil
		Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Motor
2	2.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Peramusn Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
3	2.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan
	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik
4	2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan
	2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
5	2.08.05. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	2.08.06. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab / Kota	
	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
7	2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
	2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan
	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
	2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar
	2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus

BAB III

TUJUAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan fokus pembangunan tahun 2021 – 2026 yaitu pembangunan ekonomi berbasis kawasan, Kabupaten Sukabumi menetapkan 5 prioritas pembangunan, antara lain :

1. **Ekonomi**
 - a. Pengembangan Komoditas Unggulan melalui Hilirisasi dan Perluasan Akses Pasar dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah
 - b. Pengembangan Industri Pariwisata bertaraf internasional berbasis Pertanian dan Lingkungan
2. **Sosial:** Penguatan pengentasan kemiskinan melalui reformasi sistem perlindungan sosial
3. **Pemerintahan:** Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui penguatan e-goverment dan kualitas pelayanan public
4. **Infrastruktur:** Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah
5. **SDM :** Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan kebudayaan

Berkaitan dengan ke-5 fokus tersebut, peranan perempuan tentu saja cukup berarti dalam pembangunan. Perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian, politik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, wanita memiliki 35% usaha kecil dan menengah, yang mana jenis usaha inilah yang memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, data dari FAO menunjukkan bahwa 42% perempuan Indonesia aktif dalam kegiatan hulu ke hilir dalam kegiatan budidaya perikanan. Dari segi partisipasi politik, proporsi perempuan yang berada di parlemen Indonesia berada di 19,8%.

Keberadaan perempuan yang di masa kini menduduki jabatan penting di pemerintahan maupun dunia bisnis merupakan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Walaupun

demikian, hal ini dinilai belum cukup karena kondisi perempuan di Indonesia saat ini dapat dikatakan masih memprihatinkan diantaranya karena belum terpenuhinya semua hak, masih adanya perlakuan diskriminatif, kurangnya akses, masih adanya perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi seksual dan perdagangan orang, belum tercapainya kuota 30% perempuan di legislatif, dan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal.

Masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender di Indonesia saat ini. Hal yang paling mendasar adalah bagaimana mengubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang membatasi kemajuan perempuan. Salah satu contohnya yaitu pola pikir bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena hanya berkewajiban untuk mengurus rumah tangga. Data dari Susenas KOR 2015 menunjukkan persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah berjumlah 21,51%, lebih besar dibandingkan laki-laki yang berjumlah 15,51%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang disebabkan oleh preferensi orangtua menyekolahkan anak laki-laki. Terdapat pula kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki diberikan gaji yang lebih tinggi karena dianggap sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga, sementara perempuan merupakan pendamping yang hanya menyokong penghasilan suaminya. Faktanya, data Susenas 2014 dari BPS menunjukkan terdapat sekitar 14,84% rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai hal, baik dalam aspek regulasi maupun program-program yang inovatif. Upaya pemerintah dalam pemberdayaan perempuan diantaranya adalah program *Coding Mum* atau pelatihan bahasa pemrograman dari Badan Ekonomi Kreatif yang diharapkan dapat memberikan peluang bagi ibu rumah tangga untuk bekerja paruh waktu sebagai *programmer*.

Selain itu, terdapat Gerakan *HeForShe* dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam upaya melindungi perempuan, pemenuhan hak-hak serta mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Selain itu, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai aktor utama dalam upaya pemberdayaan perempuan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dalam hal bantuan dana usaha untuk meningkatkan kualitas ekonomi, Kementerian Riset dan Teknologi dalam hal revitalisasi pusat studi wanita untuk melakukan riset terkait pembangunan daerah, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan.

Selanjutnya, peran perempuan dalam pembangunan dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas hidup terutama akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan dan hukum, perluasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik serta untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan terkait pembangunan nasional baik di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, organisasi atau kelompok tertentu serta di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, diperlukan strategi komprehensif dalam memberdayakan perempuan di Indonesia. Upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan daerah tetapi juga pihak swasta, pelaku ekonomi serta masyarakat umum termasuk keluarga.

Kedepannya diharapkan akan lebih banyak lagi program pemberdayaan bagi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan/UMKM serta pemanfaatan teknologi mutakhir yang mencakup semua wilayah dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan tiap wilayah yang tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga perempuan sehingga para perempuan dapat berperan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan responsif gender.

Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari :

1. Indeks Development Gender (IDG)
2. Kabupaten Layak anak (KLA)

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi Kepala Daerah di arahkan pada pencapaian tujuan pada tahun 2023 sesuai dengan masa Renstra yaitu untuk Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius. Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan: Meningkatnya pengarusutamaan gender serta peran perempuan dan perlindungan anak.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut: "Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga" dengan strategi "Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan" melalui :

1. Indeks Developmen Gender (IDG);
2. Kabupaten Layak anak (KLA).

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terdiri dari :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hokum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan.
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

- Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayahnya
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 - a. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sukabumi tahun 2024 disusun berdasarkan pada RENSTRA 2016 – 2021 yang sudah dilakukan pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 untuk memenuhi target IKU tahun 2023. Maka diperkukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung terpenuhinya IKU tersebut.

4.1.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi implementasikan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
1	2
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	20	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	26	Pemeliharaan Mebel
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	5	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
	6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	8	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota	
	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/kota

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	11	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	5	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	12	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	13	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	14	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	7	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	15	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	8	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	16	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	9	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	17	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	18	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
	10	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	11	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	21	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
	12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	23	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

4.1.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (IKU DP3A) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2024 ditentukan berdasarkan capaian-capaian kinerja kegiatan pada Perangkat daerah yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2021 – 2026, juga tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) DP3A Tahun 2021-2026, target IKU pada tahun 2024 ditampilkan pada table 4.2

Tabel 4.2 Target IKU PD dan IKU Program DP3A Kabupaten Sukabumi tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	STRATEGI	KEBUJAKAN UMUM	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA
							TAHUN					
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya masyarakat yang mandiri melalui pembinaan sejak dini dalam lingkungan yang religius.	Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga	1 Indeks Developmen Gender (IDG) 2 Kabupaten Layak anak (KLA)	Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran perempuan dan perlindungan anak	point	57,07	57,68	57,37	57,52	57,45	57,45
						Nilai	830	895	940	1000	1000	1000

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA
							TAHUN					
							2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	13
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	1 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Nilai Anugrah Parahyta Ekapraya (APE) Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	Nilai Persen (%)	Pratama 50,25 sd.63,74, Madya 63,75 sd. 77,24 Utama. 77,25 sd. 90,74 Mentor \geq 90,75 Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100%	85 0,0032	90	90	90	95	95	95
						0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032	0,0032

		perempuan)									
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	persentase sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Persen (%)	Jumlah sasaran keluarga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas keluarga / Jumlah sasaran Keluarga binaan dikali 100%	0,9802	0,9806	0,9809	0,9812	98,15	98,15	98,15
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat akurasi data gender dan anak	Persen (%)	Jumlah data hasil rekonsiliasi / jumlah data gender dan anak x 100%	100	100	100	100	100	100	100
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Desa/Kelurahan Layak Anak	Persen (%)	Jumlah Desa/Kelurahan yang ditetapkan / jumlah seluruh Desa x 100%	26	26	36	100	100	100	100
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persen (%)	Jumlah Anak (Penduduk usia kurang dari 18 tahun) Korban kekerasan yang ditangani / didampingi dibagi jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100 (populasi anak)	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187	0,0187

4.2 Rencana Pendanaan

Rencana Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 disajikan pada table 4.4.

Tabel 4.4. Rencana Kegiatan dan Pendanaan tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / HESLUB / HESLUB NEGATIF	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARUHH PERIODIK / RENCANA / DPO	REALISASI CAPAIAN / BELA / DPO TAHUN 2022	PRAKIRAAN / CAPAIAN / TARGET RENCANA / TRINTH 2023	TARUHH INDIKATIF / PBI	CAPAIAN KINERJA / DAY KINERJA / PENDANAAN			KELOMPOK / SALURAN	PRAKIRAAN / NILAI RENCANA / TAHUN 2023		PENANGGUNG / JAWAB	
								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PADU / INDIKATIF / (R)		
										MASIONAL					ISARK / AN
1				8	8	7	8	0	1	03	1	8			
DINAS / PEMERINTAHAN / PERUMPAHAN / ANAK								10.795.000.000.000					17.375.000.000.000.000		
2		URUSAN / PEMERINTAHAN / NAWAJA / YANG / TIDAK / BERKAITAN / DENGAN / PELAYANAN / DESA					10.795.000.000.000								
2.08		URUSAN / PEMERINTAHAN / NEGARA / PEMERINTAHAN / AN / EMPULUH / DAN / SELINDUNG / NAWAJA					10.795.000.000.000								
2.08.01		PROGRAM / PERUMPAHAN / URUSAN / PEMERINTAHAN / NAWAJA / KABUPATEN / OTA					8.190.000.000.000								

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN/ANALISIS/REKAM. KEGIATAN/TAHIT/SUB KEGIATAN	INDUK/TOPIK/PROG/AM/KEG/AM/PROG/AM/PROG/AM/TAHIT/SUB KEGIATAN	TANGGAL/PERIOD/DESKRIPSI/PA/DPD	REALISASI/ASPEK/CAPIAN/REKAM. DOK. TAHUN 2023	PRAKARANGAN/CAPAIAN/TAHAP/REKAM. DOK. TAHUN 2023	DAPILAN/INERDIA/DAN/KERANGKAS/RENDAMAN				KELOMPOK/SASARAN	PROMOSI/ALUJUD/RENCANA TAHUN 2024		PENYINGKATAN/DAERAH/PEMANGGUKAN/JAWAB		
							TARGET	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	RENCANA TAHUN 2024			
				TAHUN	PERIOD	REKAM. DOK.	TAHAP	REKAM. DOK.	TAHAP	REKAM. DOK.	TAHAP	REKAM. DOK.	TAHAP	REKAM. DOK.	TAHAP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Dokumen/REKAM. DOK. TAHUN 2023					10.000.000,00								
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen/REKAM. DOK. TAHUN 2023													

Rencana Kerja 2024

2.06.01.2.01.0004	Koordinator dan Penyusunan DP3A-0070			1 Dokumen	5.000 (Rp.5.000)	-Kad. Sulaiman, Dinas Kesehatan, Sulaiman Halohala	DANA TRANSFERIN UMUM DAERAH ALOKASI UMUM		Kebudayaan Sukabumi	10.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anak
<p> Jumlah : Dokumen Perencanaan (RKA-SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan (RKA-SKPD) </p>											

Rencana Kerja 2024

	Jumlah Dokumen yang di persiapkan dan diserahkan ke Dinas Perencanaan Pembangunan dan Kependudukan Kabupaten Sulabumi (DPA-SKPD)	1 Dokumen	5.000 000,00	Kab. Sulabumi, Banda Aceh	DINAS TRANSPORTASI KABUPATEN SULABUMI	-	Rencana Kerja Tahunan 2024 Kabupaten Sulabumi	Kabupaten Sulabumi	10.000 000,00	DINAS PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMUDAHAN KABUPATEN SULABUMI
2.08.01.2.01.0008	Kegiatan dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Kinerja Satuan Kerja SKPD									

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN N I BAGAN O URUSAN N I PROG RAN N I SUB URUSAN TAH AN	REKAT DE PROG RAN N I REKAT DE PROG RAN N I REKAT DE PROG RAN N I	TARGE T RAN JAN N I RAN JAN N I	REALIS AS RAN N I RAN N I RAN N I	MARIKA AN RAN N I RAN N I RAN N I	CAPAIAN KINERJA DAN REKORSAH PENCAPAIAN				PRIORITAS		KELUMP UK SARAN AN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
							TARU K RAN N I RAN N I	RAGU INDIKAT OR RAN N I	LONJAS	SUMBER DANA	NASIONAL	DAER AH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Cekoran Kinerja dan Siklus Manajemen Kinerja 2023 dan Laporan Masi Peningkatan Pelayanan Layanan Cekoran Kinerja dan Siklus Manajemen Kinerja 2023				12 Laporan	42.210.000,00	Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM/DAWA ALOKASIFUNGSI	1	1	Kabupaten Sukabumi	154.000.000,00		DINAS PERBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PELINDUNGAN ANAK
	2.01.01.2.01.0007															
Evaluasi Kinerja Peningkatan Kinerja																

Rencana Kerja 2024

		<p>Adnan Luzian Erhan Denny Daryoga et al Dewa)</p>				<p>81.000001</p>	<p>44.200.000.00</p>	<p>-Rtd Sukabumi Seras Makamahan, Seras Sukadane</p>	<p>DAWA TRAWAFER UMUM, DAWA AL OKAS LUMIN</p>		<p>Indones : Salmi Dwi indriani Dewa Periologi an sulfite sulfite Riya nauna reka: per ngulan sulfite sulfite perotcha n sua lita n, sula peris andjari sulfite sulfite sulfite sulfite sulfite sulfite</p>	<p>Kategori Subsidi</p>	<p>57.000.000.00</p>	<p>DINAS PEMERINTAHAN PEMUDAAN DAN PELAKSANAAN ANAK</p>
--	--	---	--	--	--	------------------	----------------------	--	---	--	---	-----------------------------	----------------------	---

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / AKTIVITAS / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGAPAN PERIODIS / BERTAHAP / TAHUNAN / OPD	REVISI / CAPAIAN / KEGIATAN / TAHUN 2022	PRAKARA / CAPAIAN / TARIK / TAHUN 2023	CAPAIAN PERKHA DAN IKHWAFKA / PENCAMUKAN				PRIORITAS		KELOMPOK / SASA / SASI	PROGRAM MALU BENCANA / TAHUN 2023		PERINGKAT / DAERAH / PENINSURANCE / JURAB	
							TARGET	LOKASI	SUMBER DANA	MUSKOPAL	DAERAH	TARGET		PAJUL / INKAGAT / PBI			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.01.01.2.02		Aktivasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan / Pemukiman / Desa					4.446.820.000,00	10	0	1	1	1	14	1	5	1	
2.01.01.2.02.0001		Perencanaan / Dan / Tugasan / ASN															

Rencana Kerja 2024

	June a) Dak 0 Mg Mg am am am Jan Top amg A ASU			25 Changkate	4.421.890.000,00	KAB. SUKABUMI Sembah Samudra Bermusik Data	DAKIA TRANSFER UMKM DAKIA ALUMAS URMIM		Rehabilitasi di Dalam PDR Kategori Social Therapy ini sudah sudah dari menyakit rehabilitasi am -giran sudah sudah proses in kegiatan k. sets pada organisasi rehabilitasi sudah pergi -stang -Karya in)	Kabupaten Sukabumi	5.186.000.000,00	SMA PEMERIKSAAN PERSEKUTUAN PERKULIAHAN ANAK	
2.08.01.2.02.0028					Koordinator Penunjang Lulusan Kejurusan Akutik Terniti BMD								

Rencana Kerja 2024

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM	TARUHAN PERSEKWI	REKAM JEJAK CAPAIAN TAHUN 2023	PRIORITAS DAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KERJA DAN HIRARKI POKOK				KELompok Sektor	PERINCIAN HASIL RENCANA TAHUN 2024		PEMANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
						TANGGAL	PAJAU INDIKATOR (RPJ) (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PROGRES	YANG DITARGETKAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Laporan ANK (Per 30/09/2023) (M. Laboni)					10.000.000,00	Kab. Sukabumi (Kecamatan: Sukabungur)	DANA TRANSFER LAKSANA ALOKASI LUM		2	2	
		Jumlah Laporan ANK (Per 30/09/2023) (M. Laboni)					10.000.000,00	Kab. Sukabumi (Kecamatan: Sukabungur)	DANA TRANSFER LAKSANA ALOKASI LUM		2	2	
		Jumlah Laporan ANK (Per 30/09/2023) (M. Laboni)					10.000.000,00	Kab. Sukabumi (Kecamatan: Sukabungur)	DANA TRANSFER LAKSANA ALOKASI LUM		2	2	
		Jumlah Laporan ANK (Per 30/09/2023) (M. Laboni)					10.000.000,00	Kab. Sukabumi (Kecamatan: Sukabungur)	DANA TRANSFER LAKSANA ALOKASI LUM		2	2	

Kontributor dan Penyusunan Laporan Keuangan: Badan/ Kecamatan/ Kelurahan/ RW/RT

Rencana Kerja 2024

<p>2 08 01 2 02 0008</p>	<p>Perencanaan Pelaksanaan dan Analisis Program Reklamasi Anggaran</p>			<p>10. Laporan</p>	<p>10.000.000,00</p>	<p>Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	<p>DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALIHKASUS DBU-UM</p>	<p>-</p>	<p>Reformasi Sistem, Hilirisasi, Sosial, Persejahteraan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Perindustrian, Perhubungan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah, dan lain-lain</p>	<p>Kabupaten Sukabumi</p>	<p>50.000,00</p>	<p>DINAS PEMERINTAHAN PERSARAFAN DAN PENCIPTAAN INOVASI</p>
--------------------------	--	--	--	--------------------	----------------------	--	---	----------	--	---------------------------	------------------	---

Rencana Kerja 2024

KODE	URUSAN / AN / BIDANG	INDUK PROGRAM / AN / KEGIATAN / AN / SUB KEGIATAN / AN	TANGGUNG JAWAB / AN / PEJABAT / AN / OPD	REALISASI / AN / CAPAIAN / AN / TARGET / AN / TAHUN / 2023	PRAKIRAAN / AN / CAPAIAN / AN / TARGET / AN / TAHUN / 2024	CAPAIAN KUALITAS DAN KEMANGKAPAN PENDANAAN				REKORD SAJAH		PEKERJAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PESANJAH DAN PEMANGKUNG JAMBE	
						TAR	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	REKORD SAJAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1. Jarak					4.000.000,00	KAB. Sukabumi, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kecamatan	DANA TRANSFER LAIN-DANA ALOKASI UNDAH	1	1	1	1	1	1
		2. Dukungan													
		3. Dukungan													
		4. Dukungan													
		5. Dukungan													
		6. Dukungan													
		7. Dukungan													
		8. Dukungan													
		9. Dukungan													
		10. Dukungan													
		11. Dukungan													
		12. Dukungan													
		13. Dukungan													
		14. Dukungan													
		15. Dukungan													
		16. Dukungan													
		17. Dukungan													
		18. Dukungan													
		19. Dukungan													
		20. Dukungan													
		21. Dukungan													
		22. Dukungan													
		23. Dukungan													
		24. Dukungan													
		25. Dukungan													
		26. Dukungan													
		27. Dukungan													
		28. Dukungan													
		29. Dukungan													
		30. Dukungan													
		31. Dukungan													
		32. Dukungan													
		33. Dukungan													
		34. Dukungan													
		35. Dukungan													
		36. Dukungan													
		37. Dukungan													
		38. Dukungan													
		39. Dukungan													
		40. Dukungan													
		41. Dukungan													
		42. Dukungan													
		43. Dukungan													
		44. Dukungan													
		45. Dukungan													
		46. Dukungan													
		47. Dukungan													
		48. Dukungan													
		49. Dukungan													
		50. Dukungan													
		51. Dukungan													
		52. Dukungan													
		53. Dukungan													
		54. Dukungan													
		55. Dukungan													
		56. Dukungan													
		57. Dukungan													
		58. Dukungan													
		59. Dukungan													
		60. Dukungan													
		61. Dukungan													
		62. Dukungan													
		63. Dukungan													
		64. Dukungan													
		65. Dukungan													
		66. Dukungan													
		67. Dukungan													
		68. Dukungan													
		69. Dukungan													
		70. Dukungan													
		71. Dukungan													
		72. Dukungan													
		73. Dukungan													
		74. Dukungan													
		75. Dukungan													
		76. Dukungan													
		77. Dukungan													
		78. Dukungan													
		79. Dukungan													
		80. Dukungan													
		81. Dukungan													
		82. Dukungan													
		83. Dukungan													
		84. Dukungan													
		85. Dukungan													
		86. Dukungan													
		87. Dukungan													
		88. Dukungan													
		89. Dukungan													
		90. Dukungan													
		91. Dukungan													
		92. Dukungan													
		93. Dukungan													
		94. Dukungan													
		95. Dukungan													
		96. Dukungan													
		97. Dukungan													
		98. Dukungan													
		99. Dukungan													
		100. Dukungan													

Rencana Kerja 2024

2.06.01.2.02	Kabupaten Suarang Wilayah Daerah Pereng Daerah	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	20.000.000,00	DAKUE PEMBIDAYAAN PENDAPIKAN DAN PERLINDUNGAN ASAM
2.06.01.2.03.0009	Perencanaan Ruang Mula Daerah pada DPO										Malayari Sukabumi
											Perencanaan Sistem Pak Indangan Sosial Pereng Wilayah Daerah Pereng Daerah Perencanaan Sistem Pak Indangan Sosial Pereng Wilayah Daerah Pereng Daerah Perencanaan Sistem Pak Indangan Sosial Pereng Wilayah Daerah Pereng Daerah Perencanaan Sistem Pak Indangan Sosial Pereng Wilayah Daerah Pereng Daerah

Rencana Kerja 2024

ID	KODE	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDUK TOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARICAKSI PERIODIK RENCANA DPA	REALISASIPROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PRAKARAIKAPRIAN TARGET RENCANA DPA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KESANGKAPAN PEMANAH				PILORITAS		KELOROK SASARAN	PRORAMA MALU RENCANA TAHUN 2023		PEMANGKAT DAMPAH PENANGKULU JAWAB											
							PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NACIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)													
															TARGET		DAERAH										
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2023				6.000.000,00	Jab. Sukoharjo, Sempu Kabupaten Sukoharjo	DANA PRORASIPER DAU/DUKDA ALOKASILELUM		1	2	Keluarga Sempu Sukoharjo			20.000.000,00											DINAS PEMERIKSAYANAN PERORANGAN DAN PELINDUNG HUKUM AWAK

Rencana Kerja 2024

2.06.01.2.05	Ademika di Kabupaten Pangreh Duren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.05.0000	Pembinaan dan Pengolahan Administrasi Keagamaan									25.000.000,00	-	-	-	-	DINAS PEMERINTAHAN MEMERINTAKAN PERLUKUTAN ANAK

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / BEKAS / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDUK PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARU KEBERHASILAN / RENCANA TAHUN 2022	REALISASI / CAPAIAN / RENCANA TAHUN 2022	PRAKIRAAN / CAPAIAN / TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA / DAU KEMAS/DAK / PENYAMAAN				PILIHAN / POKOK / SASARAN	PROJEKSI / MAJU / BELAKANG		PENGHAYAT / DAERAH / MENYUSUN / JAWAB			
							TARU / 0 / 20 / 24	PAGU / INDIKATIF / F (Rp)	LOKASI	SUMBER / DANA		PRIORITAS / NASIONAL	DAER / AH		TARGET	PAGU / INDIKATIF / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah / Dokumen / Perencanaan / dan / Anggaran / Anggaran / Anggaran				10 / Dokumen	3.000.000,00	1 / Pak. Subskab. / Semua Kecamatan / Seluruh Kabupaten	DALU / TRANSFER / LUMUR / DANA / BUKAN / LUMUR	-	1 / 2	13	14	15	16	17
													Keluarga / Sukabumi	20.000.000,00			

Rencana Kerja 2024

2.04.01.0.06	Advisi Struktural Unitas Pemerintah Daerah P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.06.0001	Pembinaan Komponen Instansi Lokal/Pemerintahan Bergunung Karba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

R D K D E	URUSAN N I S B C A N S	URUSAN N I P R O G R A M K E D A N T A N S I A N	INDIKATOR K E P R O G R A M K E D A N R E S U L T A N	TARUHAN P E R I O D E R E N I T D I P E R I O D E	KUALITAS K E P A L A N R E N J A D I P E R I O D E	PRAKIRAAN A N C A P A I N T A R G E T R E N J A D I P E R I O D E	CADANGAN KERJA DAN KEMUNGKINAN PENGANAAN				KELOMPOK K A S A N	PENGALIHAN MELI RENCANA TAHUN 2025		PEKERJAAN D I R E K T O R A T D I P E R I O D E		
							TARUHAN D I P E R I O D E	HASIL R E N J A D I P E R I O D E	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS N A S I O N A L	PRIORITAS D A I R		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.08.01.2.05.0004			Jumlah Pesar Karyawan muda Lulus/Pener SMP Siswa Kantor yang Dibebaskan	1 Pesar 1	Has. Subur, S Semua Karyawan Semua Karyawan	DANA TRANSFER DARI DAERAH ALOKASI 10000						Kecamatan Subur	1	1	25 000 000,00	DINAS KEMERDEAYANAN PEKERJAAN DAN PELINDUNG ANAK

Pengalihan Beras Logistik keatas

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN N I BEKAS D URUSAN N I PROGR AM I REGIAT AN I SUB REGIAT AN	INDIKAT OR PROGR AM I REGIAT AN I SUB REGIAT AN	TARJEM AN AKHIR PERIO DE RENET RACORD	REALISAS I CAPAIAN TAHUN 2023	PRAKORAN AN CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN POKOK DAN KEPAJODAA PENCANAMAN						KELUMP OK SEKAR AN	PROGNOSA MALU RENCANA TAHUN 2023		PEMANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
							TAREK ET 30 34	PAQU INDIKATIF P (Rp)	LOKASI	SAMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Jumlah Pekerja Borang Cekoran dan Kenyamanan Karyawan Ditambah				8 Peat	50.000.000 ID	1 Kab. Suleburi, Bertua Negeri, Bertua Negeri	DANA TRANSFER UMUM ALOKASISUBUM	1 2	13	14 Subur Subur	1 2	70.000.000 ID			DAAS REBERDAYAAN PERMULIAAN PERULUSAN MHR
2023.01.20.000		Pendidikan Berkas Beker dan Rekrutmen Perseorangan																

Rencana Kerja 2024

2.08.01.0.06.0008	Fasilitas Kupangin Teras					12 Miliar	Rp 120.000.000,00	Kab. Sukabumi, Dinas Pekerjaan Umum dan PDRD	DIPA TRANSFER DIPA-CANAL ACCOUNTS UTM	-	Belanja Sistem Perencanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi	Subsidi	Rp 120.000.000,00	DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAERAH (DIPERPLUDA) SUKABUMI
-------------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------	-------------------	--	---------------------------------------	---	---	---------	-------------------	---

Rencana Kerja 2024

K D E	URUSA N I B O URUSA N I P R O G R A M I M E D I A S I A M I N T A N	INDIKATOR P R O G R A M I S I D I K A T O R	TARU K A M P E N G D I K A T I V I T	REVISI C A P A I N M A S I N T A R U K A T	P R O G R A M A N C A P A I N T A R U K A T	C A P A I N K I N E R J A D A N K E T A R A N P E N D A I A N				K E L O M P K E L O M P S A M A N	P R O G R A M M A S I L U R E N G A T A M U N 2023		P E N G A M B A H D A E R A H P E N A N G U N G J A R A B	
						T A R I K T A M P E N G D I K A T I V I T	L O K A S I	S U M B E 	P R I O R I T A S		T A R G E T	P A D U R I D K A T I P R O		
									N A S I O N A L					D A E R A H
1		Jumlah Layanan Pelayanan Koruptor Ternak	5	2	7	0	0	1	1	13	1	5	1	1
						0 Laporan	Kab. Sukabung Sembur Kembar, Sembur Madahe	DANA TRANSFER UMIL-DANA ALOKAS UMBUM	1	2	1	4	40.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN PELOMPOH DAN PENUNJANG WAKAF
2.06.01.2.06.0000														

Penyempurnaan Model Koordinasi dan Kolaborasi SPOD

Rencana Kerja 2024

KODE	URUTAN NOMOR BLOK URUGAN PROGRAM AM / KEDUA TAN / SUB KEDUA JAWA	INDIKATOR OR PROG AM / KEDUA TAN / SUB KEDUA TAN	TANGGUP RAKIB PERG DE RENET RA ORO	REALISASI CAPAIAN REKOR OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN AN CAPAIAN TARJEM REKOR OPD TAHUN 2023	SALURAN KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN PEREMBAH				RELOMP OK SALUR AN	PRASARANA KAWASANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANDEKSIAN JAWA						
						TANGGUP RAKIB PERG DE RENET RA ORO	PAKSI MENDAGATI P (Rp)	LOKASI	BUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH AN		TARGET	PAKSI/REKOR P (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2.08.01.2.08	Penyediaan dan Pengang Kawasan Pemukiman Dusun	-	-	-	-	-	8	7.18.800.000 00	1	6	1	1	14	1	6	1	6	850.000.000.00	DI HASILKAN MELALUI PERSILAHAN DAN PERSILAHAN ANAK
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumbat Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	8	7.18.800.000 00	1	6	1	1	14	1	6	1	6	850.000.000.00	DI HASILKAN MELALUI PERSILAHAN DAN PERSILAHAN ANAK

Rencana Kerja 2024

	Jumlah Lokasi Penerimaan Jasa Sukabumi Dana Alokasi Lokal (DAL) Dana Alokasi Daerah (DAD)	12 Lokasi	154.800.000 (Rp)	Kab. Sukabumi Sangat Mendukung Sangat Baik	DANA TRANSFER LAKSAM DANA ALOKASI DAERAH	-	Rekomendasi 1. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 3. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 4. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 5. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 6. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 7. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 8. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 9. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 10. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 11. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029 12. Dalam Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi 2024-2029	Kabupaten Sukabumi	115.900.000,00
									DINAS INOVASI DAN REKREASI DAN PENGULANGAN ANAK
3.08.01.2.08.0004								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Mandiri	

KODE	URUSAH BUDAYA	INDIKATOR PROGRAM	TARUHAN PROGRAM	REALISASI PROGRAM TAHUNAN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN GURU DAN KEMAHKAMAN PENDIDIKAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BELU RENCANA TAHUN 2023		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TARGET	LOKASI	SUMBER DANA	PROFESIONAL NASIONAL		PROFESIONAL DAERAH	TARGET		REALISASI (M)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Uraian Kerja yang Disampaikan			12 Laporan		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER LRA DAERAH ALOKAS JAWAB				1	1	100 000 000,00	DINAS PEMERIKSAAN PERSEKUTUAN DAN PERINDUSTRIAN AWAK

Rencana Kerja 2024

2.06.01.2.00	Pembinaan dan Binaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa	-	-	580.140.000 (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.06.01.2.00.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan, Pajal dan Revisi Kerusakan Dinas Operasional atau Logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDUK TOR / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TANGGUNG JAWAB / RENCANA TAHUN 2023	RENCANA CAPAIAN / RENCANA TAHUN 2023	PENCAPAIAN / RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KUALITAS DAN KEMAMPUAN PEMANFAAN				KELURAHAN / DESA / KAWASAN	PROMOSI WAKTU RENCANA TAHUN 2023		REKORD KEGIATAN / PENGGUNAAN JANGKA	
							TARGET	PAJUK INDIKATIF (R)	TARGET	PAJUK INDIKATIF (R)		MASIONAL	DAERAH		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Rencana Dinas Kecamatan Lingkungan Kecamatan Dukuh dan Kecamatan Pemerintah Kecamatan				18 Unit	300 M.000,00	- Kab. Sukabumi, Serta Kecamatan/Desa/RT/RW	DANA TRANSFER/URUM DANA/ALOKASI UMUM		1	1	300.000.000,00	DINAS PEMERINTAH DAERAH/PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
	3.08.01.2.05.0007														

Pemerintahan Aed Teloq Lathya

Rencana Kerja 2024

	Jumlah Akal Rakyat Lainnya yang Diperoleh	40 Lini	Rp 25.000.000, 00	Kab. Sukabung Sembu Nekarab Sembu MatDua	DAK TRANSFER LUNAK-DANA ALOKASI LEMEM	-	Kabupaten Sukabung	30.000.000,00	DINAS PEMERIKAAAN PEMERINTAH DAN PEMUNGUTAN PAJAK
2	2.000,00	-	482.838.000, 00	-	-	-	-	804.000.000,00	-

Rencana Kerja 2024

M D	K D D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	MOMENTUM / PROGRAM / KEGIATAN / KEMASAN	TAKDIR / AKHIR PERIODEN / RENCANA / DPO	REALISASI / CAPAIAN / RENCANA / DPO / TAHUN 2023	PRAKIRAAN / CAPAIAN / TARGET / RENCANA / DPO / TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN PERENCANAAN PENCAPAIAN				KELOMPOK / SAKAL / AN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB	
							TARIF / SIK / DPO / 2024	PAGU INDIKATIF / (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PROGNOSTIK / NASIONAL	DAFTAR / DAFTAR		TARGET
1	2										14	1	1	1	3
2.08.02.01		Aktivitas Pengabdian Masyarakat (PUS) dan Layanan Kesehatan Masyarakat									Kabupaten Sukabumi			174.000.000,00	DINAS PERBERDAYAAN / PEMBUNYAIAN / REKREASIKAN ANAK
2.08.02.01.0001		Kontribusi dan Sumbangan Masyarakat Kabupaten Sukabumi													

Rencana Kerja 2024

2.08.02.2.01.0002	Kegiatan dan Pelaksanaan Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen: 1000 Rincian: 1000	3 Dokumen	102.750.000,00	Kab. Sukabung, Sempu Kecamatan, Sempu Kabupaten	DAU - TRANSFER CAJAK DAU ALOKASI LUMAJ	-	Kategori: 1. Sistem Perencanaan Sosial Peringkat Kabupaten, 2. Bidang: 2000, 3. Subbidang: 2000, 4. Kegiatan: 2000, 5. Subkegiatan: 2000, 6. Lokasi: Kabupaten Sukabung, 7. Mekanisme: 2000, 8. Jenis Kegiatan: 2000, 9. Subjenis Kegiatan: 2000, 10. Subsubjenis Kegiatan: 2000	Kabupaten Sukabung	70.000.000,00	DINAS PERENCANAAN PERMUKAAN DAN PERUMAHSANTIAAN
-------------------	--	---------------------------------------	-----------	----------------	---	--	---	--	--------------------	---------------	---

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUM N/ BIDAN	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	URUM N/ SUB	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGKAPAN PENANAMAN				KELOMPOK DASAR		REAKSI MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET	PAU INDIKATIF (R)	TARGET	PAU INDIKATIF (R)	KELM	DA	NASIONAL	DAER		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.08.02.2.01.0003		Jumlah Dorongan Pilih dan Siklonisasi Pelayanan Keperawatan dan Gendak PNU Kerangka Kerangka GK				3.000000	20.000.000	Nab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Desa										DINAS PERUBAHAN PERUMAHAN, DAN PERENCANAAN PERKOTAAN	

Rencana Kerja 2024

		<p>Acara Penerimaan Dana Bagi Hasil Mencakup Alokasi Sumbangan dan Sumbangan Dana Bagi Hasil Pengembangan daerah (PDB) Ternak Perikanan Perdagangan Berkas Gander (PWSG) Kewirausahaan Kerjasama Kor</p>	<p>IC Penerimaan Dana</p>	<p>20.300.001 (0)</p>	<p>Kab. Sukabumi Semua Kecamatan Semua Desa</p>	<p>DANA TRANSFER DAKU DANA ALOKASI DAKUM</p>	<p>-</p>	<p>Revisi 1. Sistem Pariwisata 2. Sistem Pengelolaan Sampah 3. Sistem Pengelolaan Lingkungan 4. Sistem Pengelolaan Perikanan 5. Sistem Pengelolaan Perdagangan 6. Sistem Pengelolaan Kewirausahaan 7. Sistem Pengelolaan Kerjasama Kor</p>	<p>Kabupaten Sukabumi</p>	<p>100.000.000,00</p>	<p>DINAS PERBERKAYAN PERUMAHAN PERENCANAAN PERKOTAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN</p>	
<p>2.00.02.1.01.0004</p>	<p>Sosialisasi Kebijakan Pengabdian PUS (Pemasukan PPHG)</p>											

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / N / RENCANA / PROGRAM / AN / SUB PROGRAM / AN / SUB PROGRAM / AN	INDIKATOR / OR / PROGRAM / AN / SUB PROGRAM / AN	TARICAH / AKHIR / PERIOD / DE / MENYUSUN / MUDRA	REALISASI / CAPAIAN / M / RENCANA / CPO / TAHUN / 2024	PILAKHANA / AN / CAPAIAN / TARGE / RENCANA / CPO / TAHUN / 2024	CAPAIAN KINERJA / DAN KERANGKA / PERENCANAAN				KELOMPOK / SASARAN	PERUBAHAN MELU RENCANA / TAHUN 2024		POMONKAT / DAERAH / PENANGGUNG / JAWAB		
							TARGET / 2024	PADU / BERSIKAP / F (R)	LOKAS	SUMBER / DANA		PRIGITAS / NASIONAL	DAER / AH		TARGE	PADU / INDIKAT / F (R)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<p>Indikator / Deskripsi / yang / Monev / dan / Evaluasi / Pelaksanaan / Program / dan / Layanan / (PLD) / Tersebut / Berencana / Penyelesaian / dan / Laporan / Ganda / (PPLG) / Berencana / dan / Laporan / Ganda / (PPLG) / Berencana / dan / Laporan / Ganda / (PPLG)</p>				80 / Persentase / Change	30.488 / 000 / 00	Mus. Subsektor / Sentral / Kecamatan / Semua / Kecamatan	DANA / TRANSFER / UM / PADUK / ALOKAS / (UM) / 24	1 / 1	1 / 1	14	1 / 1	100.000 / 000 / 00	DINAS / PERBENDU / YAN / DESK / DAN / DAERAH / PERLUTER / UJUN / BANK

Rencana Kerja 2024

2.08.02.1.02	Pendekatan Pemenuhan Subsidi Hibah, Subsidi, dan Bantuan lainnya kepada Masyarakat, Koperasi, Koperasi, dan Koperasi	-	-	-	200.000.000,00	-	Revisi Subsidy dan Bantuan lainnya kepada Masyarakat, Koperasi, Koperasi, dan Koperasi	Kabupaten Sukabumi	-	100.000.000,00	DANA PERBERDAYAAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.1.02.0002	Adanya Kebijakan dan Pendekatan Pemenuhan Subsidi Hibah, Subsidi, dan Bantuan lainnya kepada Masyarakat, Koperasi, Koperasi, dan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR	TARUJH AKHIR PERIODIK	REKAM CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KERJA DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH				KELUMPUKAN	FRASIKAWAN MALU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET	REKAM CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	REKAM CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023		REKAM CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	TARGET		REKAM CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Menerima Bantuan dan Pendampingan					3 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Sukabumi, Benua Karama, Benua Kencana	DANA TRANSFER LRA MALU RENCANA ALOKASI LRA, RA	1	1	500.000.000,00	DIKAS PEMBANGUNAN PERSEKUTUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Kerja 2024

2.08.03.2.03	Pegawai dan Penghasilan dan Biaya Lain-lain yang dibayarkan dan Ditanggung Kabupaten/ Kota	-	-	-	31.330.000,00	-	-	-	-	-	Kabupaten Sukabumi	-	-	90.000.000,00	DAUAK PEMERIKHAAN PERSEKUTUAN DAN PERLINDUNGAN RUMAH
2.08.03.2.03.0001	Adwaka Kologkar dan Pendampingan secara Lantaga Pihaknya Lainnya Perencanaan Perencanaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAH BIDANG	INDIKATOR	TARUHAN	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	CAPAIAN KENDERAJUAN DAN KERESKONDIANSI				PRAKIRAAN MALU BERDAMA TAHUN 2025		RELEWAN	PERSAWAHT DARIKAWA
							TARGET	REKORDE	REKORDE	REKORDE	REKORDE	REKORDE		
1	2	URUSAH BIDANG	INDIKATOR	TARUHAN	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET	TARGET	REKORDE	REKORDE	REKORDE	REKORDE	TARGET	REKORDE	PERSAWAHT DARIKAWA

Rencana Kerja 2024

					10. Pendidikan Daerah	50.000.000,00	- Kab. Sukabumi, Siswa Kecamatan Sempu Kat'Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA AL. CIBIS LUMAJ	-		Belanja Operasi Pendidikan Siswa Kecamatan Sempu Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat Untuk Membayar Biaya Pendidikan Siswa Kecamatan Sempu Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat	Masyarakat Kabupaten Sukabumi	42.000,00,00	DINAS PEMERINTAHAN PENDUKUNG DAN PELAKSANAAN AUMK
--	--	--	--	--	--------------------------	---------------	---	---	---	--	--	-------------------------------------	--------------	---

Ambat
Pendidik
Cairat yang
Membayar
Biaya
Pendidikan
Siswa
Kecamatan
Sempu
Kab. Sukabumi
Provinsi
Jawa Barat

Rencana Kerja 2024

H O	K O D E	URUSAN N I B E D A N D U R U S A N I P R O G R A M / K E D A Y A T A N / S U B K E D A Y A T A N	INDIKATOR PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	TARU M A C H R O N I K P E R I O D E R E N D I T W A R D A O R D I N A M E N T A L	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMANGSA PEKERJAAN				PRIORITAS		KELUAS A N S A S A N	PENCAPAIAN BELU RENCANA TAHUN 2024		PEMANFAAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TAR I G E T	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAER A H	TARGET		PAJU K INKATIF (Rp)			
1	2.06.03.2.01	Pelayanan Layanan Kujawa Lantun bag Perencanaan Kajian Kebutuhan Ketenag ayan Menerukan Koordinas i Ketenag ayan Subsektor	-	0	0	7	0	0	1	1	13	16	1	0	0	1	1
							200.000.000,00						171.000.000,00				DINAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PABELAN
	2.06.03.2.01.001																

Pelayanan Layanan Perencanaan bag Perencanaan Kajian Kebutuhan Ketenag ayan Subsektor

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / M / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKATOR / OR / PROOK / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	TARU ET / AKHIR PERIOD E / RENCANA TA HUN 2024 (DPA)	REKAPIT ULASI / CAPAIAN / RENCANA / OPD / TAHUN 2024	PRAKIRA AN / CAPAIAN / TARIKAT / RENCANA / OPD / TAHUN 2025	CUPAAN KURJIA DAN KEMEROKA PENCANAAN				KELOMPOK / DEK / SASAR AN	REKAPIT ULASI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH / PENANGGUNG JAWAB
							TAR G ET / 20 24	HAJU / RENCANA / F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS / NASIONAL / DAER AH	TAR G ET	
1	9		Jumlah Layanan Trikot Jari per Pengalihan yang Merencanakan Akreditasi S1 (S1) dan S2 (S2) Program Studi Akreditasi A dan B di Kabupaten Karangasem	5	5	7	35 Layanan	100.000.000,00	Kab. Sukabumi, Sertua Kecamatan, Sertua Kecamatan	DANA / TRANSFER / UJUM / DANA / ALOKASI / TUNJUK	1	1	140.000.000,00	DINAS / PEMERINTAH / DAERAH / KEMEROKA / PERENCANAAN / DAN / PELAKSANAAN

Rencana Kerja 2024

2.04.00.2.03	Pengukuran dan Pengembangan Layanan Persepsi Perilaku	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.00.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penerima Layanan Penyuluhan Layanan Persepsi Perilaku	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															

Rencana Kerja 2024

4	2 28 54	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BELAJAR	Jumlah Anggaran dalam RUPiah Desain dan Prosidir Rencana Rencana " Akademi" RUMAH Membantu " Perencanaan Kualitas Siswa	0	30 Orang	40.000.000,00	Kab. Sukabumi Sektor Kesehatan Sektor Pendidikan	DAFTAR TRANSKRIPT UMUM (DAM) NICHOSI UMUM	-	Kebijakan di Dalam Pusat Indikator Sosial Peningkatan dan kualitas sumber daya manusia melalui pen- yediaan kualitas layanan pendidikan " kooperatif " serta pemer- dayaan masyarakat sasaran yang mampu " Akademi " dan	Kelembagaan Garis Kebijakan Perencanaan dan Non- Dokumentasi Kebijakan Subsidi	35.000.000,00	DAFTAR PEMERIKSAAN PERSEKUTUAN PERKULIAHAN ANAK
				3.654.000.000,00	0	40.000.000,00			-			4.348.000.000,00	

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUNA N/ BIDAN	PROGAM AM/ SUB-PROGAM/ KEGIATAN	INDIKATOR AM/ SUB-INDIKATOR	TANGGAPAN/ RENCANA TAHUN 2024	REALISASI RENCANA TAHUN 2023	PENCAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENDANAAN				RELEMBER/ SALURAN	PENCAPAIAN BILU BENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET	PAKAI BERSIKATI (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET
1	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Kinerja dalam Menyelesaikan Kewajiban Ganda (K2) dengan Asas Tripartit (Gairah, Naluri, dan Rasa)							1	1	0	1	1	1	1	DINAS PERKERJAAN, PESILANGAN DAN PERENCANAAN/ BAK
Alokasi Anggaran dan Penerimaan untuk Pengembangan dan Peningkatan Asas Kewirausahaan Kabupaten.																

Rencana Kerja 2024

No	Kategori	Kode	Materi Pokok	Jumlah Kegiatan	Monev	Kategori	Materi Pokok	Monev	Kategori
1	Peningkatan Kualitas Masyarakat	33	Peningkatan Kualitas Masyarakat	50.000.000	0	Kab. Sukabung	DANA TRANSFER DAFTAR	0	DANA TRANSFER DAFTAR
			Jumlah Kegiatan	50.000.000	0	Kab. Sukabung	DANA TRANSFER DAFTAR	0	DANA TRANSFER DAFTAR
			Monev	0	0	Kab. Sukabung	DANA TRANSFER DAFTAR	0	DANA TRANSFER DAFTAR
			Monev	0	0	Kab. Sukabung	DANA TRANSFER DAFTAR	0	DANA TRANSFER DAFTAR

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAH BINAAN / URUSAH / PROGRAM / SUB PROGRAM / TUNJUKAN / SUB TUNJUKAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	TARUHAN / AKHIR / PENYUSUNAN / RENCANA / DOKUMEN	REALISASI / CAPAIAN / RENCANA / OPD / TAHUN 2023	PRAKIRAAN / CAPAIAN / TARGET / RENCANA / OPD / TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA / DOKUMEN / PENCAPAIAN				RELOMP / OK / SIKLUS / AM	PROBLEMA / MALU / RENCANA / TAHUN 2024		PENGUKUR / DAERAH / PENYUSUNAN / JARIB	
							TARUHAN / G / ET / 24 / 24	PANGU / BUDGET / (Rp)	LOKAS	SUBSIDY / DANA		PRIORITAS / NASIONAL / DAIRY / AM	TARGET		PANGU / INDIKATIF / (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<p>Jumlah / Dokumen / Hasil / Pengukuran / Kegiatan / Masyarakat / Perencanaan / KEBERHASILAN / AKSESIBILITAS / RENCANA / Kegiatan / Aksi</p>					30.000.000,00	100%	100%	100%	100%	100%	300.000.000,00	100%
															<p>DINAS / PEMERINTAH / DAERAH / PENYUSUNAN / JARIB</p>

Rencana Kerja 2024

2 06 04 2 02	Pengadaan dan Pengembangan Lintasi Perantara, Layanan Pengiriman, Kurir, Stasiun	-	-	-	1.700.000.000,00	-	-	-	-	Kabupaten Sukabumi	2.000.000.000,00	DINAS PERSEKUTUHAN PERUMAS dan DAH PERKURANGAN AJAR
2 06 04 2 02 0001	Alokasi Anggaran dan Pendampingan Pengembangan Lintasi Perantara Pengiriman Kurir Melalui Layanan Pengiriman Kurir Kabupaten Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

M D	K D D E	URUTAN BIDANG	URUTAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB	REVISI	PRAKIRAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PONDASIAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENDONGKONG JAWAB
								TARGET	INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Cerdas Pribadi Berprestasi dan Berkeadilan yang mendapat Atensi dan Penguatan				4. Luasnya	1.750.000.000,00	Rias Sukabumi, Serang, Kacamatan, Serang Kacamatan	DANA TRANSFER LUNAK/LOKASI ALOKAS URUM	1	1	1	1	1	DINAS PERSEKUTUWAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANAK	
2	08.04.2.02.0003			Program, yang terdapat Lembaga Penyelenggara Kegiatan Olahraga Tarung Pagarin Kabupaten Sukabumi													

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAH BUDAYA / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR / PRODUK / HASIL / SUB HASIL / KEGIATAN	TARUHHAN / PERIODISASI / RENCANA TAHUN 2022	REALISASI / CAPAIAN / RENCANA / RENCANA TAHUN 2022	PRAKARSA / AN / CAPAIAN / TARGET RENCANA / RENCANA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA DAN KENDARA PENCAPAIAN				PILORIAN MAJU RENCANA TAHUN 2022		KELOMPOK / SASARAN	PEMERINTAH DAERAH / PEMANGGULANG JAWAB	
							TAK / G / ET / 20 / 24	PAJUS / INDIKATOR / (R)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS / NASIONAL / DAER / AH	TARGET			PAJUS / INDIKATOR / (R)
1	2.05.04.2.03	Perayaan Layanan Higiene Keseluruhan Mempromosikan 60 dan 100 Anas yang Wajar yang Pelayanan dan Dapat Kualitas					8	9	1	1	1	1	14		
								1.000.000.000,00						2.000.000.000,00	
	2.05.04.2.03.0001	Perencanaan Perencanaan Laporan Komprehensif bagi Keluarga dalam Menjabarkan K0 dan Perencanaan Anas yang Wajar yang Pelayanan dan Dapat Kualitas													

Rencana Kerja 2024

2 08 06 2 01 0000	Penyiapan dan Pelaksanaan Data Gender Ber-Awal dalam Kabupaten Kota di Kawasan dengan Kabupaten	Amdan Dukumen JMB Gender dan Awal Kabupaten Kota yang Tersebut	2 Oktober	48.570.000,00	- Mak. Siskelery, Serius Kembangkan Semua MafCama	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASIBUMI	-	Reforma di Sektor Pati mangan Peningga di Lualla sundar dipa rekrusa restra pdi Pigara sindan kapan pendulu n kudapa n, sero pendi, adayaan restra kudan perga mangan n adanya di	Kawasan Subsidi	200.000.000,00	DINAS PERSEKUTUHAN PERDIKSI DAN PERLINDUNGAN ANAK
-------------------	---	---	-----------	---------------	---	---	---	--	--------------------	----------------	---

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAH BUDAYA	NOMOR PROSEDUR	NOMOR KEPUTUSAN	TARIF	REVISI	KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN	KEMERDEKAAN	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMUKAN PENCAPAIAN				KELompok Sasaran	PELAKSANAAN BELAJAR MENJALAN TAHUN 2025		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARIF	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITY			TARIF	PAGU INDIKATIF (Rp)
															NASIONAL	DAERAH			
1	5	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	2.08.06	PROGRAM PEMERINTAH ANAK ANAK (P3A)														1.800.000.000,00		DIHASE REHABILITASI DAN PERUMPAH ANAK PERUMPAH ANAK	

Rencana Kerja 2024

2.08.08.2.01	Pembinaan P3A pada Lembaga Kemasyarakatan, NPM, dan Organisasi Kelembagaan Kabupaten Kota	-	-	-	272.000.000,00	-	-	-	Rekomendasi: Bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pengajian di Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar, diskusi, kajian, kajian pustaka, penyusunan laporan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, kegiatan lain, serta pendampingan masyarakat dalam pengorganisasian dan akselerasi.	Masyarakat Sipil, Persepsi dan Nilai, Persepsi Masyarakat, Sistem	-	780.000.000,00	CIKAS PEMBERDAYAAN PERMUKAWANAN PERLUKUTGAM ANAK
2.08.08.2.01.0001	Adiklat Kebijakan dan Pengembangan Persepsi Nilai Anak pada Lembaga Persepsi Nilai Persepsi, Ikhtis dan Dunia Usaha Masyarakat Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

KODE	URUSAN N1 SEKIAN D	KEGIATAN OR PROGR AM / KESAT AN / SUB KEGIAT AN	TARU ET AKHIR PERIO DE REVISI RA OPD	REALIS ASI CAPSIA M REKLA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARUET REKLA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN PENCAPAIAN DAN PENCAPAIAN				PILORITAS		KELORP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB		
						TARU ET 20 24	PANGU INDIKATI P (R0)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAER AH		TARUET	PANGU INDIKATI (R0)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jurnal Organisasi Pemerintah Mak Pemerintah Media dan Dukuk Usaha Yang Mendapat Artisitas Kegiatan dan Pengembangan Pemerintahan Mak dan Mak dan Organisasi Pemerintah Mak Pemerintah Media dan Dukuk Usaha	127 Organisasi	220.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DANA TRANSFER DAKUM-DAMA ALOKASI UMUM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN PERENCANAAN DAN PERKULIAHAN
9.00.00.2.01.0000	Koodum dan 20-kocosa Meningkatkan Penerimaan Pajak Arak Kewenangan Kabupaten/Kota																

Rencana Kerja 2024

	Analisis Dokumen Akad Anggaran dan Struktur Pelaksanaan * Penyusunan Amd. RKA Anggaran * Kabupaten ACB		20 Dokumen	50.000.000, 00	- Kab. Sukabung - Dinas Kependidikan, Pemuda dan Olahraga	DANA TRANSFER UMUM DANA KEMAS LUMAJ	-	Reformasi Sistem Per adangan Sosial Perings dan Luas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja pendidaha kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan mutu dan daya saing	Masyarakat Sipil dan Pemerintahan Kabupaten Sukabung	100.000.000,00	DANA PEMERIKHAAN PERSIBUKAN DAN PERKEMBANGAN ANAK
--	---	--	---------------	-------------------	---	---	---	--	---	----------------	---

Rencana Kerja 2024

2.08.08.1.01.0002	Koordinator dan Sekretaris Pelaksanaan Mandorongan Pemogatan Kualitas Induk Anak Tingkat Daerah Kabupaten	200 Orang	20.000.000,00	Kab. Sukabumi, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALIANSI UMUM	-	Rekrutmen 1. Salari 2. Biaya Perjalanan 3. Biaya Penginapan 4. Biaya Transportasi 5. Biaya Makan 6. Biaya Transportasi 7. Biaya Komunikasi 8. Biaya Lain-lain 9. Biaya Lain-lain 10. Biaya Lain-lain 11. Biaya Lain-lain 12. Biaya Lain-lain 13. Biaya Lain-lain 14. Biaya Lain-lain 15. Biaya Lain-lain 16. Biaya Lain-lain 17. Biaya Lain-lain 18. Biaya Lain-lain 19. Biaya Lain-lain 20. Biaya Lain-lain	Masukan: 1. Dana Transfer 2. Dana Transfer 3. Dana Transfer 4. Dana Transfer 5. Dana Transfer 6. Dana Transfer 7. Dana Transfer 8. Dana Transfer 9. Dana Transfer 10. Dana Transfer 11. Dana Transfer 12. Dana Transfer 13. Dana Transfer 14. Dana Transfer 15. Dana Transfer 16. Dana Transfer 17. Dana Transfer 18. Dana Transfer 19. Dana Transfer 20. Dana Transfer	100.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
-------------------	---	-----------	---------------	---	--	---	--	---	----------------	--

Rencana Kerja 2024

MD	KODE	URUSAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / M / SUB M / SUB KEMANTHAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARICHTERPELOPOR	REVISI	PRAKOR	CAPAIAN KINERJA DAN KEMUNDUKAN PENDANAAN				PROJEKAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKARAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET	PAJAU INDIKATIF (R)	LOKASI	BUMBUK DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAJAU INDIKATIF (R)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Jalur Arter Lemah / Penyakit Lainnya / Pengobatan Kritis / Jalur Arter Kardiologi / Kardiologi / Kardiologi				8 Dokumen	20.000.000,00	-Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER DAERAH	1	1	14	1	2	3	4
7	2.08.07	PROGRAM PELINDUNGAN KORBAN ANAK						300.000.000,00								1.000.000.000,00	

Rencana Kerja 2024

2.06.07.2.01	Peningkatan di Kawasan Terkait Arah yang Melibatkan para Pihak Lokasi Dan Kebudayaan KOR	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00	Masyarakat Serta Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Sukabumi	-	DHAK PEMBERDAYAAN PESEMPUAN DAN PELJULUANGAN MANA
2.06.07.2.01.0004	Asosiasi dan pendampingan Penggerak Daerah dalam rangka melaksanakan program kegiatan pengabdian KITA	Jumlah SKM yang mendapat adiklat dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan dan Desa KITA	6 Orang	50.000.000,00	-	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAKTA TRANSFER MURAH DAN ALOKASI LUMAH	-	75.000.000,00	Masyarakat Serta Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Sukabumi	-	DHAK PEMBERDAYAAN PESEMPUAN DAN PELJULUANGAN MANA
2.06.07.2.01.0005	Penyusunan kegiatan pembinaan data aset lingkungan kor cda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

No	Kode	URUSAH BAHAN	INDIKATOR	TARUHAN	REALISASI	PENCAPAIAN	CAPAIAN UNDULA DAN KEMUNDIA PENCAPAIAN				KELOMPOK SALURAN	PRAKARAI BALI RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB			
							TARGET	REKORD	REKORD	REKORD		TARGET	PAJAU INDIKATIF (Rf)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Anggaran pendapatan asli daerah yang ditargetkan				85.000.000,00	0		0							DINAS PERENCANAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Rencana Kerja 2024

2.06.07.2.02	Pencapaian Layanan Masyarakat yang Baik yang Meningkatkan Persepsi Masyarakat Kabupaten Tegal Terhadap Kualitas Pelayanan KKB	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	Indonesia Jember Pati Blora Sragen Sembung Pekalongan Batang Tegal Kendal Magelang Madiya Cilacap Cepu Sukoharjo Boyali Pondokrejo Lasem Tegal Pati Blora Sragen Sembung Pekalongan Batang Tegal Kendal Magelang Madiya Cilacap Cepu Sukoharjo Boyali Pondokrejo Lasem	Masyarakat Kabupaten Sukabumi	-	-	825.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI	
2.06.07.2.02.0000	Pencapaian Layanan Masyarakat Masyarakat yang Baik yang Meningkatkan Persepsi Masyarakat Kabupaten Tegal Terhadap Kualitas Pelayanan KKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Kerja 2024

NO	KODE	URUSAN K/ID/BD/URUSAN K/ID/PROG/KAM/KEGATAAN/TAN/SUB/PEGA/TAR	INDIKATOR PROGRAM/ KEGATAAN/ SUB KEGATAAN	TANGGAPAN AKHIR PEMOBA DE REKST RA/ DPA	REALISASI GAPLA N REKST DPA TAHUN 2023	PRAKARSAN AN CAPAIAN TANGGAP REKST DPA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGWA PEMANTAHAN				KELIM POK SAGAR AN	PERENCANAAN MALU BENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAN/ATAH PENANGGUNG JAWAB				
							TAR G ET 30 Juni	PAJZ INDIKAT OR (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		NASIONAL	DAER AH		TARGET	PAJZ INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah AMPH paku recovery obat literasi pencegah di	6	6	7	8	100.000.000,00	Kab. Sukabumi Sempoa Kecamatan Sempoa Kecamatan	DANA TRANSFER LULUS-DANA ALOKASI UMUM	1	1	1	1	1	1	DINAS PEMBINAAN PERUMAHAN DAN PERLINDUNGAN RUMAH	
	2.02.07.2.02.0008																	

Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPH

Rencana Kerja 2024

R O	K D C D E	URUSAN M / BIDANG D URUSAN M / PROG RAM / PEKERJAAN M / KAWASAN KEMERDEKAAN TEM	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEDUKTAN	TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN M / KAWASAN KEMERDEKAAN TEM	REALISASI ASAS KAPALAN M	PRAKTIK ASAS KAPALAN M	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PEKERJAN				PRIORITY		KELOMPOK DASAR MASYARAKAT	PEKERJAAN MALU RENCANA TAHUN 2024		PEMERINTAH DAERAH PENGUNJUNG JAWAB	
							TAR	INDIKATIF (R)	LOKUS	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	MAJU INDIKATIF (R)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Jumlah ALOKASI M / KAWASAN KEMERDEKAAN TEM				100.000.000,00		DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				Masyarakat Sesuai Kategori Pemerintah dan Kategori Kategori Kategori		15.000.000,00		DINAS PEMERINTAHAN KEBUDAYAAN DAN PERKOTAAN
							10.799.000,00	0,00							17.323.000.000,00		

BAB V PENUTUP

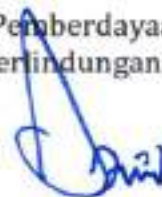
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DP3A Kabupaten Sukabumi disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan, nomenklatur Program / Kegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 50-5889 Tahun 2021.

Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja ini melalui tahap – tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan Bidang-bidang di lingkungan DP3A, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal. Selanjutnya RENJA digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Sukabumi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tolok ukur RENJA, maka seluruh aktivitas harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada Input (masukan), namun lebih ditekankan kepada *Output* (keluaran), *Outcome* (hasil) , *Benefit* (manfaat) dan *Impact* (pengaruh/dampak yang ditimbulkan dari manfaat suatu program dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya suatu program) dari program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna , bersih dan bertanggung jawab.

Sukabumi, 07 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,



Drs. H. EKIRADIANA RIZKI, M.Si

Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19680805 198803 1 001